

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Attamimi, A. Hamid S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 2014, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Hariwijaya, 2007, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*, Dua Satria Offset, Yogyakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2010, *Pembatasan Perkara Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, Dan Berkualitas*, LEIP, Jakarta.
- Lumbuun, Ronald S., 2011, *Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, RajaGrafindo Persada.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Panggabean, Henry Pandapotan, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta.

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta.

Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suadi, Amran, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Swantoro, H. Herri Swantoro, 2017, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia Group, Depok

Tjandra, W. Riawan, 2010, *Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

## **B. Tesis**

Nanda Utama, 1994, *Permohonan Peninjauan Kembali dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Timbul Mangasih, 2016, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013*, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Charles Barita Hamonangan Sihombing, 2017, Aspek Keadilan Terhadap Pembatasan Satu Kali Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176).

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2015.

#### **E. Internet**

Ahmad Mustaqim, 2016, Upaya Hukum Penolak Bandara Kulon Progo Buntu. Diakses dari <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/8koRm3Rb-upaya-hukum-penolak-bandara-kulon-progo-buntu>, 14 Maret 2018

Abba Gabrillin, 2015, JIMLY: Tidak Ada Putusan MK yang Sebut PK bisa

berkali-kali. Diakses dari

[https://nasional.kompas.com/read/2015/01/10/10095771/Jimly.Tidak.Ada.Putusan.MK.yang.Sebut.PK.Bisa.Berkali-kali?utm\\_campaign=related&utm\\_medium=bp&utm\\_source=news&](https://nasional.kompas.com/read/2015/01/10/10095771/Jimly.Tidak.Ada.Putusan.MK.yang.Sebut.PK.Bisa.Berkali-kali?utm_campaign=related&utm_medium=bp&utm_source=news&), tanggal 12 Juni 2018

Sri Bintang Pamungkas dan Anggalih Bayu, 2017, Prahara Mega Proyek Pembangunan Bandara Kulon Progo. Diakses dari <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, tanggal 17 Agustus 2018

Herri Swantoro, 2017, Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/321933465\\_PERMOHONAN\\_UPAYA\\_HUKUM\\_PENINJAUAN\\_KEMBALI\\_KEDUA\\_KALI\\_BERBASIS\\_Keadilan\\_Dan\\_Kepastian\\_Hukum\\_Menuju\\_Pembaharuan\\_Hukum\\_Acara\\_Perdata](https://www.researchgate.net/publication/321933465_PERMOHONAN_UPAYA_HUKUM_PENINJAUAN_KEMBALI_KEDUA_KALI_BERBASIS_Keadilan_Dan_Kepastian_Hukum_Menuju_Pembaharuan_Hukum_Acara_Perdata), tanggal 15 Oktober 2018

Desi Suryanto, 2018, Bandara Kulonprogo Ini Peran Pemda Diy Dalam Proyek NYIA. Diakses dari

<http://www.jatengpos.com/2018/02/bandara-kulonprogo-ini-peran-pemda-diy-dalam-proyek-nyia-895847>, tanggal 15 Oktober 2018

Setio Sapto Nugroho, 2009, Harmonisasi Perundang-Undangan. Diakses dari

<http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf>, 15 Oktober 2018

## **F. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Toto Wardoyo, Kasubag Pelayanan Hukum dan HAM Pemda Kulon Progo, 30 Agustus 2018

Wawancara dengan Badar, Bakti Murtini, Cintoko Hari dan Suhadi, Masyarakat Terdampak Desa Glagah Kulon Progo, 8 Agustus 2017

Wawancara dengan Agus Parmono, Kepala Desa Glagah Kulon Progo, 7 Agustus 2018